

SPIRITUALISME PANCASILA

Suatu Visi Kebangsaan



Heri Herdiawanto, M.Si.
Dr. Fokky Fuad Wasitaatmadja
Jumanta Hamdayama, M.Si.

SPIRITUALISME PANCASILA

Suatu Visi Kebangsaan

Oleh:

Heri Herdiawanto, M.Si.

Dr. Fokky Fuad Wasitaatmadja

Jumanta Hamdayama, M.Si.

UAI PRESS

SPIRITUALISME PANCASILA
Suatu Visi Kebangsaan

karya Heri Herdiawanto, M.Si, Dr. Fokky Fuad Wasitaatmadja,
Jumanta Hamdayama, M.Si

Copyright © 2015, Heri Herdiawanto, M.Si
Dr. Fokky Fuad Wasitaatmadja,
Jumanta Hamdayama, M.Si,

Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Pewajah Sampul: Denny Azhari S. @denny.azhari
Pewajah Isi: Husni Kamal— @penerbitchange

Edisi Revisi : Februari 2017

ISBN: 978-602-73176-9-7

UAI Press
Jln. Sisingamangaraja, Kompleks Masjid Agung Al Azhar
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110,
Telp. : 021-72792753
Fax : 021-7244767
www.uai.ac.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vi
PENDAHULUAN.....	viii
BAB I PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA....	1
A. Pengertian Ideologi.....	1
B. Pancasila sebagai ideologi Nasional.....	5
C. Pengertian Asal Mula Pancasila.....	7
D. Bangsa Indonesia Ber-Pancasila dalam Tri Prakara.....	11
E. Kedudukan dan Fungsi Pancasila.....	12
F. Pancasila dan Identitas Nasional.....	19
BAB II PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN	
BANGSA INDONESIA.....	39
A. Masa Kerajaan Nasional di Indonesia.....	39
B. Masa Kerajaan Islam.....	51
C. Masa Penjajahan Hindia Belanda.....	55
D. Masa Perjuangan pada Masa Penjajahan.....	60
E. Masa Sekitar Proklamasi Kemerdekaan.....	71
F. Masa Pergerakan Kemerdekaan.....	60
G. Wawasan Keislaman - Kebangsaan.....	80
H. Konklusi.....	113
BAB II FILSAFAT PANCASILA.....	115
A. Pengertian Filsafat.....	115
B. Pancasila Sebagai Suatu Sistem Filsafat.....	125
C. Falsafah Pancasila Kontempelasispiritualisme.....	136
BAB IV HAK ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA.....	159
A. Sejarah Hak Asasi Manusia.....	159
B. Macam-macam Hak Asasi Manusia.....	164
C. Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pancasila.....	165
D. Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945.....	166
E. Hak Asasi Manusia Menurut UU No.39 Tahun 1999.....	170
F. Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia.....	170

G. Negara Hukum dan Hak Asasi.....	170
H. Pelanggaran Hak Asasi Manusia	171
BAB V PANCASILA DAN ETIKA KEHIDUPAN BERNEGARA	179
A. Pengertian Etika.....	179
B. Pengertian Nilai	180
C. Pengertian Moral.....	191
D. Pengertian Norma	191
BAB VI PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA	195
A. Pengertian Paradigma.....	195
B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan.....	196
C. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi	199
D. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Hukum	202
E. Pola dan Bentuk Demokrasi Ekonomi Pancasila.....	206
BAB VII PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI	211
A. Faktor Pendorong Keterbukaan Ideologi Pancasila	216
B. Menampilkan Sikap Positif Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka.....	218
C. Pancasila Dan Ideologi Ideologi Besar Di Dunia	221
BAB PANCASILA DAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA	239
A. Latar Belakang.....	239
B. Arti dan Makna Proklamasi.....	247
BAB IX DEMOKRASI PANCASILA	251
A. Sejarah Pertumbuhan Demokrasi Pancasila	251
B. Ciri-ciri Demokrasi Pancasila.....	253
BAB PANCASILA DAN AMANDEMEN UUD 1945	263
A. Pengertian Undang Undang Dasar 1945	263
B. Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.....	264
C. Makna Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.....	266
D. Pokok-pokok Pikiran Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.....	268
E. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dengan Tertib Hukum Indonesia.....	269
F. Hubungan Pembukaan dengan Batang Tubuh Undang Undang Dasar 1945.....	270

G. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Hubungannya dengan Pasal-pasal.....	274
H. Tujuan Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila.....	274
I. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila	275
J. Amandemen Undang Undang Dasar 1945.....	275
BAB XI PANCASILA DAN DINAMIKA KETATANEGARAAN DI INDONESIA.....	289
A. Masa Awal Kemerdekaan	290
B. Periode Konstitusi RIS (1949-1950)	292
C. Masa Undang Undang Dasar Sementara Tahun 1950	294
D. Masa Orde Lama (5 Juli 1959-11 Maret 1966).....	301
E. Masa Orde Baru (11 Maret 1966-21 Mei 1998).....	305
F. Masa Reformasi (21 Mei 1998- Sekarang)	307
RIWAYAT PENULIS.....	317
DAFTAR PUSTAKA	320

BAB I

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA

A. Pengertian Ideologi

Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harafiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksudkan adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan harus dapat dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, dan paham.

Kata ideologi pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf Perancis, yakni Antoine Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan "sains tentang ide". Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif. Ideologi merupakan cara memandang segala sesuatu, sebagai akal sehat dan beberapa kecenderungan filosofis, atau sebagai serangkaian ide yang dikemukakan oleh kelas masyarakat dominan kepada seluruh anggota masyarakat (definisi ideologi Marxisme). Ideologi terdiri dari berbagai keyakinan dan cita-cita yang dipeluk oleh suatu kelompok tertentu, kelas sosial, bangsa atau suatu ras.

Ideologi yang semula berarti gagasan, ide, cita-cita itu berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang oleh seseorang atau sekelompok orang menjadi suatu pegangan hidup.

BAB II

PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

A. Masa Kerajaan Nasional di Indonesia

Dalam sejarah nenek moyang bangsa Indonesia pada awal mendiami wilayah Indonesia hidup berburu dan mengumpulkan makanan (*food gathering*). Mereka hidup berkelompok dan mengembara, karena belum memiliki tempat tinggal tetap. Perkembangan selanjutnya, mereka sudah bisa bercocok tanam dan hidup menetap (*food producing*). Dalam kondisi ini mereka hidup berdasarkan hubungan kekeluargaan dan selalu menerapkan prinsip kebersamaan dan gotong royong dalam melakukan pekerjaan.

Sedangkan dari segi ras, orang Indonesia berasal dari ras melayu yang datang dan kemudian menyebar mendiami berbagai wilayah yang ada di Nusantara. Kehadiran mereka telah memberikan dasar pondasi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kelak. Orang Indonesia memiliki kemiripan dengan orang-orang yang berasal dari dataran Asia, khususnya Asia Tenggara. Persamaan inilah yang menjadi dasar hubungan yang erat antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Nenek moyang kita secara jelas zaman dahulu telah menjalani hidup dalam tata masyarakat yang teratur, bahkan sudah dalam bentuk kerajaan kecil kuno, seperti kerajaan Kutai yang lahir pada abad V di Kalimantan Timur, dengan rajanya yang terkenal Mulawarman. Berikutnya adalah kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang memperoleh masa kejayaan pada masanya masing-masing.

BAB III

FILSAFAT PANCASILA

A. Pengertian Filsafat

Secara etimologis istilah "*filsafat*" atau dalam bahasa Inggrisnya "*philosophi*" adalah berasal dari bahasa Yunani "*philosophia*" yang secara lazim diterjemahkan sebagai "*cinta kearifan*" kata *philosophia* tersebut berakar pada kata "*philos*" (*pilia, cinta*) dan "*sophia*" (*kearifan*). Berdasarkan pengertian bahasa tersebut filsafat berarti cinta kearifan. Kata kearifan bisa juga berarti "*wisdom*" atau kebijaksanaan sehingga filsafat bisa juga berarti cinta kebijaksanaan. Berdasarkan makna kata tersebut maka mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep kebijakan hidup yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Seorang ahli pikir disebut filosof, kata ini mula-mula dipakai oleh Herakleitos.

Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan.

Ciri-ciri berpikir filosofis:

1. Berfikir dengan menggunakan disiplin berpikir yang tinggi.
2. Berfikir secara sistematis.
3. Menyusun suatu skema konsepsi, dan
4. Menyeluruh.

BAB IV

HAK ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA

A. Sejarah Hak Asasi Manusia

Awal mula perkembangan hak asasi manusia dimulai pada tahun 1215 dengan munculnya *Magna Charta* (Piagam Agung) yaitu perjuangan di kalangan para bangsawan Inggris yang membatasi kekuasaan raja John. Demikian pula pada abad ke-17, ketika tidak ada harapan bahwa keadilan dapat diwujudkan, perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia berjalan terus. Melalui pergolakan dan perundingan yang lama akhirnya *Bill of Rights* (Undang-Undang Hak) diterima oleh Raja William III pada tahun 1689. *Bill of Rights* merupakan suatu naskah perundang-undangan yang dihasilkan melalui suatu revolusi tak berdarah (*the Glorious Revolution of 1688*) terhadap Raja James II.

Perjuangan yang serupa juga berlangsung di Perancis dan Amerika Serikat. Dengan gigih rakyat Perancis menentang Raja dinasti Bourbon yang memerintah dengan kekuasaan mutlak. Melalui perjuangan yang dikenal dengan revolusi Perancis (1789) kemudian menghasilkan *Declaration droits de l'homme et du Citoyen* (pernyataan hak asasi manusia dan warga negara). Dalam tahun yang sama, perjuangan rakyat Amerika Serikat berhasil membuahkan *Bill of Rights* yang kemudian menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar Amerika Serikat pada tahun 1791.

Timbulnya gagasan mengenai hak ini pada dasarnya merupakan akibat dari perkembangan aliran rasionalisme. Pemikiran ini tercermin dalam karya-karya Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) keduanya dari Inggris

BAB V

PANCASILA DAN ETIKA KEHIDUPAN BERNEGARA

Pendahuluan

Nilai, norma, dan moral adalah konsep-konsep yang saling berkaitan. Dalam hubungannya dengan Pancasila maka ketiganya akan memberikan pemahaman yang saling melengkapi sebagai sistem etika.

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang menjadi sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Disamping itu, terkandung juga pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pemikiran filsafat adalah suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar yang memberikan landasan bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis atau kehidupan nyata dalam masyarakat, bangsa dan negara maka diwujudkan dalam norma-norma yang kemudian menjadi pedoman. Dengan demikian, Pancasila pada hakikatnya bukan merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif ataupun praksis melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma.

A. Pengertian Etika

Etika adalah kelompok filsafat praktis (filsafat yang membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada) dan dibagi menjadi dua kelompok. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan

BAB VI

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA

A. Pengertian Paradigma

Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul "*The Structure Of Scientific Revolution*", paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai) sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.

Dalam ilmu-ilmu sosial manakala suatu teori yang didasarkan pada suatu hasil penelitian ilmiah yang mendasarkan pada metode kuantitatif yang mengkaji manusia dan masyarakat berdasarkan pada sifat-sifat yang parsial, terukur, korelatif dan positivistik, maka hasil dari ilmu pengetahuan tersebut secara epistemologis hanya mengkaji satu aspek saja dari obyek ilmu pengetahuan yaitu manusia.

Dalam masalah yang populer istilah paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dari suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan dan pendidikan.

BAB VII

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI

Pendahuluan

Sebagai suatu ideologi yang harus jadi pengawal negara republik Indonesia, sekaligus sebagai pengarah perjalanan bangsa, Pancasila tidak boleh berubah jati dirinya menjadi sebuah ideologi yang tertutup, yang sekali tidak mau menerima penafsiran-penafsiran baru. Apabila hal ini sampai terjadi maka Pancasila akan bagi bangsa dan negara Pancasila harus menjadi sebuah ideologi terbuka. Hanya dengan sikap membuka diri dari berbagai penafsiran atau interpretasi baru dalam operasionalitasnya yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan jamanlah Pancasila akan dapat mempertahankan relevansinya dengan kebutuhan bangsa dan negara yang senantiasa berkembang dengan cepatnya.

Sebagaimana pada ideologi-ideologi lainya yang bersikap terbuka, maka selaku ideologi terbuka Pancasila dapat menunjukkan persyaratan sebagaimana diuraikan di atas:

a) Dimensi realitas; dalam arti bahwa ideologi Pancasila benar-benar mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat bangsa Indonesia. Pancasila dirumuskan dengan cara mengagregasikan nilai-nilai luhur yang terdapat ajaran agama dan kebudayaan bangsa. Pancasila benar-benar menampilkan diri sebagai kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang dimiliki dan diyakini oleh bangsa Indonesia.

b) Dimensi Idealisme; dalam arti kualitas idealisme yang tergantung dalam Pancasila mampu menggugah harapan, memberikan optimis dan motivasi kepada para pendukungnya, hingga gagasan vital yang terkandung didalamnya bukan sekedar utopia, melainkan

BAB VIII

PANCASILA DAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

A. Latar Belakang

Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, atau "*Dokuritsu Junbi Cosakai*", berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau disebut juga *Dokuritsu Junbi Inkai* dalam bahasa Jepang, untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah Timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan menemui Jepang bahwa pasukan Jepang sedang di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.

Sementara itu di Indonesia, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sutan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta dan Radjiman bahwa

BAB IX

DEMOKRASI PANCASILA

A. Sejarah Pertumbuhan Demokrasi Pancasila

Bahasan mengenai demokrasi Pancasila tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan falsafah Pancasila. Hal ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila diciptakan oleh masyarakat Indonesia dengan ciri-ciri yang masih murni diwarnai oleh watak dan hubungan manusia-masyarakat Indonesia yang bersifat kekeluargaan. Watak atau karakter yang bersifat kekeluargaan ialah suatu hubungan hidup yang tercipta dari dalam kelompok manusia yang mengutamakan hubungan batin diantara anggota kelompok masyarakat, oleh karenanya setiap manusia siap berkorban untuk kepentingan manusia lainnya. Watak masyarakat Indonesia seperti ini berbeda dengan watak masyarakat komunal.

Demokrasi Pancasila dengan asas musyawarah mufakat pada hakikatnya merupakan prinsip dan nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila sehingga segala upaya pemahaman, penghayatan dan pengamalan demokrasi Pancasila terlebih dahulu harus diawali dengan proses pemahaman dan penghayatan falsafah negara ideologi Pancasila. Secara operasional, demokrasi Pancasila senantiasa dijiwai dan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Sejarah pertumbuhan demokrasi Pancasila, dapat dipandang dari dua aspek yaitu aspek material dan aspek formal sebagai berikut:

BAB X

PANCASILA DAN AMANDEMEN UUD 1945

A. Pengertian Undang Undang Dasar 1945

Yang dimaksud dengan Undang Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertinggi yang berlaku di Indonesia yang terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Pembukaan terdiri atas empat alinea yang merupakan pokok kaidah fundamental atau norma dasar. Pada alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 1968.

Bagian inti adalah batang tubuh yang tersusun atas bab, pasal, ayat serta aturan peralihan dan aturan tambahan. Batang tubuh terdiri atas dua bagian pokok, yaitu bagian pertama tentang sistem pemerintahan negara, dan bagian kedua memuat tentang hubungan negara dengan warga negara dan penduduk Republik Indonesia, serta memuat konsep negara di bidang politik.

Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Penjelasan umum isinya mengenai:

1. Undang Undang Dasar sebagian dari hukum dasar.
2. Pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan.
3. Undang undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan ke dalam pasal-pasalannya.
4. Undang Undang Dasar bersifat singkat dan supel.
5. Sistem pemerintahan negara.

Kedudukan Undang Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis. Selain hukum dasar yang tertulis, ada hukum dasar yang bersifat tidak tertulis yang biasa disebut dengan nama

BAB XI

PANCASILA DAN DINAMIKA KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Pendahuluan

Dinamika ketatanegaraan suatu negara dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain situasi politik tertentu yang mendorong pemerintahan melakukan perubahan dan atau penyimpangan terhadap konstitusi negara yang resmi. Selain itu, perubahan nilai dalam negara dapat mempengaruhi dinamika ketatanegaraan karena nilai yang terdapat dalam Undang Undang Dasar sudah tidak lagi memadai.

Pembahasan mengenai perkembangan dan pelaksanaan ketatanegaraan suatu negara dan secara lebih khusus Indonesia didasarkan pada konstitusi negara atau UUD 1945. Perubahan konstitusi akan merubah pola dan struktur ketatanegaraan yang ada. Begitu pula perjalanan bangsa dan negara Republik Indonesia diwarnai oleh dinamika yang tajam. Hal ini diakibatkan situasi politik dan kondisinya yang mengharuskan melakukan perubahan untuk mengantisipasi setiap perubahan.

Di bawah ini adalah periode dinamika ketatanegaraan Indonesia dari sejak kemerdekaan sampai dengan sekarang.



Secara politik kenegaraan reformasi telah berhasil dengan membangun sistem, regulasi, dan format kelembagaan politik yang jauh lebih baik dari masa sebelumnya. Akan tetapi, reformasi yang didasari ruh liberalisme telah membuat fondasi moralitas, etika, dan mentalitas menjadi rontok. Hal ini ditambah dengan reformasi tanpa didasari grand design-atau arah yang jelas baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.

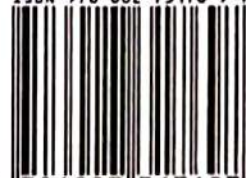
Berbagai persoalan yang menyeruak kelapangan ini membuat rakyat merindukan kembali sosok Pancasila ideologi yang selama ini ditinggalkan. Pancasila merupakan ideologi yang dibentuk berdasarkan karakter Indonesia yang multi etnis, multi geografi, dan multi kultur diharapkan mampu membentengi negara ini dari terpaan nilai-nilai liberalisme yang berkedok globalisasi.

Buku ini hadir dalam upaya memberikan pengetahuan dan pemahaman kembali akan eksistensi dan kokohnya nilai-nilai Pancasila. Dengan adanya buku ini diharapkan generasi muda khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya memperoleh penyegaran kembali tentang Pancasila sehingga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

 UAI PRESS

Jl. Sisingamangaraja
Kompleks Masjid Agung Al Azhar
Kabupaten Baru, Jakarta Selatan, 12110
Telp : 021-72792753
Fax : 021-7264767
www.uai.ac.id

ISBN 978-602-73176-9-7



9 786027 317697